

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi guna keseragaman penggunaan kode arsip dan untuk memudahkan Perangkat Daerah mengidentifikasi arsip dalam penemuan kembali arsip, perlu diatur penggunaan kode klasifikasi arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Kode Klasifikasi Arsip.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6801);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5289);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk mengsinkronisasikan informasi kearsipan antara Perangkat Daerah dan Dinas dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Dinas; dan
c. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

BAB II
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

(1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
(3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Januari 2025
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Januari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDARGIRI HILIR

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KODE KLASIFIKASI ARSIP

000 UMUM
- 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
  - 000.1.1 Telekomunikasi
  - 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
    - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
    - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
    - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
  - 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
    - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
    - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
    - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
  - 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
  - 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
  - 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
  - 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
    - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
    - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
    - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
  - 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
    - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
    - 000.1.8.2 Penghijauan
    - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
    - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
    - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
    - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
  - 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
    - 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
    - 000.1.9.2 Pemasangan
  - 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
    - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
    - 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
  - 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
  - 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
- 000.2 PERLENGKAPAN
  - 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
    - 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
    - 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan

000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3 Distribusi
000.2.3.1 Barang habis pakai
000.2.3.2 Barang milik daerah
000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN
000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa,

penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN
000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.4.2 Deposit Bahan Pustaka
000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
000.4.3 Koleksi Pustaka
000.4.3.1 Pembelian
000.4.3.2 Hibah
000.4.3.3 Hadiah
000.4.3.4 Tukar Menukar
000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR

000.4.3.6 Terbitan Internal
000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6 Layanan Perpustakaan
000.4.6.1 Keanggotaan
000.4.6.2 Peminjaman
000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
000.4.7.1 MoU
000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
000.4.8.1 Pengembangan situs web
000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10 Konservasi
000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12 Transformasi Digital
000.4.13 Kurasi Digital
000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
000.4.14.1 Perpustakaan Umum
000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.5 KEARSIPAN
000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.5.2 Pembinaan Kearsipan
000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
000.5.2.5 Data Base Arsiparis
000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain:

Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan

000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan

000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI

000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)

000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)

000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)

000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)

000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)

000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)

000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

000.5.6 Penyusutan Arsip

000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)

000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan

000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip)

000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)

000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)

000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)

000.5.9.7 Preservasi Kuratif

000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)

000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)

000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)

000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN

000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana

000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan

000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

000.5.15 Pengawasan Kearsipan
- 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
- 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
- 000.5.15.3 Sanksi

000.6 PERSANDIAN
- 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.6.2 Pengamanan persandian
  - 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
  - 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
  - 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
- 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
  - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
  - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
  - 000.6.3.3 Pelaksanaan
  - 000.6.3.4 Pelaporan
- 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
  - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
  - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
- 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
  - 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
  - 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
  - 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
  - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
  - 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
  - 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
  - 000.6.5.7 Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang
  - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
  - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
  - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
  - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
  - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
  - 000.7.1.6 Musrenbang Desa
- 000.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah
  - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
  - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
  - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
  - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
  - 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
  - 000.7.2.8 Laporan Berkala
  - 000.7.2.9 Laporan Insidential
  - 000.7.2.10 Evaluasi Program
- 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
000.7.6 Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah
000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
000.7.7.2 Pendanaan Daerah
000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
000.8.1.1 Pembentukan
000.8.1.2 Pengubahan
000.8.1.3 Pembubaran
000.8.2 Uraian Jabatan
000.8.2.1 Analisa Jabatan
000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
000.8.3 Ketatalaksanaan
000.8.3.1 Proses Bisnis
000.8.3.2 Standar Pelayanan
000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
000.8.3.4 Pelayanan Publik
000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
000.8.6.1 Budaya Kerja
000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN
000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi
000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

000.9.6.1 Data
000.9.6.2 Statistik
000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian

000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
100.1.4.5 Assosiasi Daerah
100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa
100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
100.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
100.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
100.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah

100.2.4 Fasilitasi Kecamatan
100.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 HUKUM
100.3.1 Program Legislasi
100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
100.3.1.2 Program Legislasi
100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur
100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati
100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota
100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4 Instruksi / Surat Edaran
100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi
100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota
100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5 Surat Perintah
100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama
100.3.7.1 Dalam Negeri
100.3.7.2 Luar Negeri
100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran

100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata

100.3.11.3 Tata Usaha Negara
100.3.11.4 Perburuhan
100.3.11.5 Arbitrase
100.3.11.6 Sengketa Adat
100.3.12 Perijinan
100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
100.3.13.1 Hak Cipta
100.3.13.2 Hak Paten
100.3.13.3 Hak Desain Industri
100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5 Hak Merk
100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK
200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
200.1.2.3 Bela Negara
200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3 Kewaspadaan Nasional
200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
200.1.4.1 Ketahanan Seni
200.1.4.2 Ketahanan Budaya
200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
200.1.4.6 Fasilitasi
200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
200.1.5 Politik Dalam Negeri
200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan

200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
200.1.5.6 Pemerintah Daerah
200.1.5.7 Database Parpol
200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
200.1.5.9 Pemilihan Umum

200.1.6 Ketahanan Ekonomi
200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2 PEMILU

200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual

200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
270.04.05 Peta Daerah Pemilihan

200.2.5 Pencalonan Pemilu
200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan
200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran
200.2.5.3 Daftar bakal calon

200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi
200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6 Kampanye Pemilu
200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7 Dana Kampanye
200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
200.2.8.2 Master surat suara
200.2.8.3 Surat suara yang terpakai
200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan
200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN
300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4 Perlindungan Masyarakat
300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN
300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring

300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
300.2.2.6 Registrasi BEACON
300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8 Operasi Komunikasi
300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
300.2.8.3 Registrasi BEACON
300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
300.2.12.1 Laporan Harian
300.2.12.2 Laporan Bulanan
300.2.12.3 Laporoan Tahunan
300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya

400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
400.1.5.5 Ketenagakerjaan
400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus

400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
400.2.2.1 Data gender
400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi
400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
400.2.4.2 Data perlindungan anak
400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN
400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
400.3.2.2 Pelatihan Sosial
400.3.2.3 Peringatan Hari anak
400.3.2.4 Block Grant
400.3.3 Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
400.3.3.3 Pembinaan Program
400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5 Pameran
400.3.3.6 Rakor
400.3.3.7 Sosialisasi
400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
400.3.5.2 Block Grant
400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan
400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)
400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
400.3.6.1 Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
400.3.6.2 Block Grant
400.3.6.3 Lomba, festival
400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.6.5 Pendataan
400.3.6.6 Kelembagaan
400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan
400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
400.3.7.3 Sertifikasi Guru
400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru
400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
400.3.7.7 Block Grant
400.3.8 Sekolah Menengah Atas
400.3.8.1 Kurikulum
400.3.8.2 Bahan Ajar
400.3.8.3 Pelatihan
400.3.8.4 Block grant

400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.8.6 Lomba, Sayembara, festival
400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)
400.3.8.8 Bantuan siswa miskin

400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
400.3.9.1 Bahan ajar
400.3.9.2 Petunjuk Teknis
400.3.9.3 Block grant
400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival
400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran
400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran
400.3.9.8 Pendataan
400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi

400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
400.3.10.3 Setifikasi Guru
400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
400.3.10.7 Block grant
400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi

400.3.11 Penilaian Pendidikan
400.3.11 Penilaian Akademik
400.3.12 Penilaian Non Akademik
400.3.13 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian

400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
400.3.13.2 Sarana Pendidikan
400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
400.4.3.1 Olahraga Massal

400.4.3.2 Olahraga Tradisional
400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata

400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
400.4.4.3 Olahraga Prestasi
400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga

400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
400.4.5.1 Olahraga Tradisional
400.4.5.2 Layanan Khusus

400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
400.4.6.2 Penghargaan Olahraga

400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
400.4.7.2 Kompetisi
400.4.7.3 IPTEK Olahraga

400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan

400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
400.4.9.1 Industri Olahraga
400.4.9.2 Promosi Olahraga

400.4.10 Olahraga Prestasi
400.4.10.1 Daerah
400.4.10.2 Nasional
400.4.10.3 Internasional

400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
400.5.2.3 Pengembangan

400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum

400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK

400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
400.5.5.1 Pengkajian

400.5.5.2 Pengembangan
400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)

400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan

400.5.7 Kewirausahaan
400.5.7.1 Kelembagaan
400.5.7.2 Pengaderan
400.5.7.3 Perintisan

400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya

400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
400.5.9.1 Standardisasi
400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda

400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400.5.10.1 Kemitraan
400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN

400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
400.6.2.1 Registrasi Nasional
400.6.2.2 Pelindungan
400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi

400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi

400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1 Sejarah
400.6.4.2 Pemetaan nilai
400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah

400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
400.6.5.2 Kekayaan budaya

400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN
400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
400.7.2.9 Pembiayaan darah
400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan
400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik
400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan
400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi
400.7.5.2 Patologi dan toksilogi
400.7.5.3 Radiologi
400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi
400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan
400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6 Kesehatan Jiwa
400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
400.7.7.2 Imunisasi
400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
400.7.7.4 Kesehatan matra
400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis
400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang
400.7.9.1 Pengendalian malaria
400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
400.7.10.3 Penyakit kanker
400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11 Penyehatan lingkungan
400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat

400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
400.7.13 Gizi
400.7.13.1 Gizi makro
400.7.13.2 Gizi mikro
400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
400.7.13.5 Kewaspadaan gizi
400.7.14 Kesehatan ibu
400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
400.7.14.4 Keluarga berencana
400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15 Kesehatan anak
400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan
400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga
400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
400.7.17.2 Kapasitas kerja
400.7.17.3 Lingkungan kerja
400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
400.7.17.6 Kesehatan olahraga
400.7.18 Obat Publk dan perbekalan kesehatan
400.7.18.1 Harga obat publik
400.7.18.2 Pengadaan obat
400.7.18.3 Perbekalan kesehatan
400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan
400.7.19.1 Alat kesehatan
400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20 Kefarmasian
400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian
400.7.20.2 Farmasi klinis
400.7.20.3 Farmasi Komunitas
400.7.20.4 Penggunaan obat rasional
400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian
400.7.21.1 Obat tradisional

400.7.21.2 Kosmetik dan makanan
400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
400.7.22.1 Surat keterangan
400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan
400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
400.7.23.3 Pemantauan dan informasi
400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun
400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25 Intelegensia Kesehatan
400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26 Kesehatan Haji
400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27 Promosi Kesehatan
400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
400.7.27.4 Hari Kesehatan
400.7.28 Data dan Informasi
400.7.28.1 Statistik kesehatan
400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi
400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400.7.29.4 Obat Asli Indonesia

400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
- 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
- 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
- 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
- 400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
- 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya

400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN
- 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.8.2 Fasilitasi
  - 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
  - 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
  - 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan
  - 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
  - 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
- 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
  - 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
  - 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
  - 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
  - 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
  - 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.9 SOSIAL
- 400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
  - 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
  - 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
  - 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
  - 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
  - 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
- 400.9.3 Rehabilitasi Sosial
  - 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
  - 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social
  - 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
- 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
  - 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung

400.9.4.2 Tuna susila dan korban traffking perempuan
400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
400.9.10.4 Kerjasama
400.9.11 Jaminan Sosial
400.9.11.1 Seleksi dan vrifikasi
400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
400.9.11.4 Kerjasama
400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
400.9.12.1 Ketahanan keluarga
400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia

400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi
400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
400.9.14.5 Bantuan Langsung
400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan
400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
400.10.4.1 Budaya Nusantara
400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.11.2 Pertamanan
400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
400.11.2.2 Taman Kota
400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
400.11.3 Pemakaman
400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
400.11.3.2 Pemakaman
400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
400.11.4 Jalur Hijau
400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
400.11.5 Peran Serta Masyarakat
400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
400.11.7 Pengelolaan Data
400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
400.12.2 Pendaftaran Penduduk
400.12.2.1 Identitas Penduduk
400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3 Pencatatan Sipil
400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
400.12.5.2 Kualitas Penduduk
400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6 Penyerasian Kependudukan
400.12.6.1 Indikator Kependudukan
400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA
400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
400.13.7 Pengembangan Sistem
400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8 Pengembangan Materi
400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9 Monitoring dan Evaluasi

400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10 Analisis Sosial
400.13.11 Analisis Ekonomi
400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
- 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
- 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
- 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
- 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
- 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga

400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga

400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga

400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.41 Advokasi dan pencitraan
400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
400.13.42.1 Promosi
400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
400.13.42.3 Produk media komunikasi
400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
400.13.51 Analisis dan evaluasi
400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi

400.13.52.2 Pengelolaan bank data

400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi

400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi

400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi

400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan

400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1 Keprotokolan

400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)

400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan

400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah

400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat

400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media

400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan

400.14.4.1 Kliping koran

400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat

400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan

400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah

400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah

400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM

400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan

400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)

400.14.5.5 Forum Kehumasan

400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa

400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD

400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten

400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal

400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik

400.14.10 Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan

400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan

400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

500.1.2.1 Ketersediaan Pangan

500.1.2.2 Akses Pangan

500.1.2.3 Kerawanan Pangan

500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan

500.1.3.1 Distribusi Pangan

500.1.3.2 Harga Pangan

500.1.3.3 Cadangan Pangan

500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan

500.1.4.1 Konsumsi Pangan

500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan

500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar

500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan

500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan

500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)

500.1.7 Bimbingan Teknis

500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri

500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha

500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan

500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan

500.2.2.4 Informasi Perusahaan

500.2.2.5 Pelaku Pasar

500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah

500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah

500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal

500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri

500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi

500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi

500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik

500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik

500.2.2.14 Informasi Pasar

500.2.2.15 Informasi Hasil Industri

500.2.2.16 Barang Strategis

500.2.2.17 Bahan Pokok Agro

500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar

500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi

500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar

500.2.3.4 Tata usaha

500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi

500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
500.2.3.11 Jasa
500.2.3.12 Kerjasama
500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
500.2.3.16 Pengawasan
500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP

500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
500.2.4.1 Pengkajian pasar
500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
500.2.4.4 Pengkajian pasar
500.2.4.5 Pengembangan Pasar
500.2.4.6 Sistem informasi
500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang

500.2.5 Bimbingan Teknis
500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3 Produksi
500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4 Pembiayaan
500.3.4.1 Program Pendanaan
500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
500.3.4.3 Urusan Permodalan
500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit

500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)

500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
- 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
- 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
- 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
- 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
- 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
- 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
- 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
- 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
- 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
- 500.3.6.5 Advokasi

500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
- 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
- 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
- 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
- 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis

500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
- 500.3.8.1 Penelitian Koperasi
- 500.3.8.2 Penelitian UKM
- 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
- 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga

500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
- 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
- 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana

500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

500.4 KEHUTANAN

500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.4.2 Penyuluhan
- 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
- 500.4.2.2 Materi Penyuluhan
- 500.4.2.3 Program Penyuluhan
- 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
- 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
- 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
- 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
- 500.4.2.8 Deseminasi
- 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan

500.4.3 Planologi Kehutanan
- 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
- 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
- 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
- 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan

500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
500.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK
500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.3 Kerjasama
500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5 Perpanjangan
500.4.4.6 Modal dan Peralatan
500.4.4.7 Investasi Industri
500.4.4.8 Peralatan
500.4.4.9 Tenaga Kerja
500.4.4.10 Pemegang Saham
500.4.4.11 Neraca Perusahaan
500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17 Produksi Kayu
500.4.4.18 Produksi non kayu
500.4.4.19 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21 Industri Non Kayu
500.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25 Pemblokiran
500.4.4.26 Denda
500.4.4.27 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam

	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan

500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
500.4.6.11 Bina Cinta Alam
500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA

500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4.7.1 Pengelolaan Benih
500.4.7.2 Kebun Benih
500.4.7.3 Tegakan Benih
500.4.7.4 Pengadaan Benih
500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.7 Pembibitan
500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
500.4.7.14 Perhutanan Sosial
500.4.7.15 Pengendalian Perladangan

500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
500.4.8.3 Diseminasi
500.4.8.4 Gelar Teknologi
500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.5.2 Perikanan Tangkap
500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

500.5.2.12 Kelembgaan Usaha Penangkapan
500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha
500.5.2.14 Kenelayanan
500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha
500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan

500.5.3 Perikanan Budidaya
500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan
500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya

500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
500.5.4.2 Pengembangan Produk
500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
500.5.4.4 Industri Pengolahan
500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
500.5.4.8 Pengembangan Industri
500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
500.5.4.18 Pengembangan Impor
500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri

	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas

500.5.6.12 Pengawakan Kapal Pengawas
500.5.6.13 Sistem Pemantauan
500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan
500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
500.5.6.17 Penyidikan
500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran

500.5.7 Karantina Ikan
500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan
500.5.7.2 Penahanan
500.5.7.3 Pengasingan
500.5.7.4 Pengamatan
500.5.7.5 Pengakuan
500.5.7.6 Penolakan
500.5.7.7 Pemusnahan
500.5.7.8 Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
500.5.7.9 Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
500.5.7.10 Permohonan Sertifikat
500.5.7.11 Pemasukan Formulir
500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat
500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
500.5.7.14 Surat Perintah
500.5.7.15 Rekomendasi
500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
500.5.7.21 Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN
500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.6.2 Perlindungan hortikultura
500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3 Perbenihan Hortikultura
500.6.3.1 Penilaian Varietas
500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
500.6.4.1 Basis Data Lahan
500.6.4.2 Pengendalian Lahan
500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan

	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang

500.6.13.4 Aneka Umbi
500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
500.6.14.1 Tanaman Pangan
500.6.14.2 Holtikurtura
500.6.14.3 Perkebunan
500.6.14.4 Peternakan
500.6.15 Mutu dan Standariasi
500.6.15.1 Standardisasi
500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
500.6.16.2 Investasi
500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
500.6.17 Pemasaran Domestik
500.6.17.1 Informasi Pasar
500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
500.6.17.4 Jaringan Pemasaran
500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20 Diseminasi
500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
500.6.26.1 Hak Cipta
500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
500.6.26.3 Hak Paten Biasa
500.6.26.4 Hak Merek
500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)

500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28 Pelayanan Hukum
500.6.28.1 Sertifikasi
500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
500.6.29 Karantina Pertanian
500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
500.6.29.2 Karantina Hewan
500.6.30 Bimbingan Teknis
500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN
500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7.2.2 Pakan Ternak
500.7.2.3 Budidaya Ternak
500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7.3 Bimbingn Teknis
500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN
500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.8.2 Tanaman Semusim
500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim

500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.4 Tanaman Tahunan
500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
500.8.5 Perlindungan Perkebunan
500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN
500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
500.9.2.1 Industri Manufaktur
500.9.2.2 Industri Agro
500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.3 Promosi Industri
500.9.3.1 Industri Manufaktur
500.9.3.2 Promosi Industri Agro

500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
500.9.4.1 Industri Manufaktur
500.9.4.2 Industri Agro
500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual
500.9.5.1 Industri Manufaktur
500.9.5.2 Industri Agro
500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.6 Industri Hijau
500.9.6.1 Industri Manufaktur
500.9.6.2 Industri Agro
500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
500.9.12 Standarisasi
500.9.12.1 Standar
500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
500.9.12.3 Infrastruktur Standar
500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
500.9.13.1 Kebijakan Industri
500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
500.9.14.1 Industri Hijau
500.9.14.2 Lingkungan Hidup
500.9.14.3 Energi
500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah

500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.2.3 Pertambangan
500.10.2.4 Panas Bumi
500.10.2.5 Geosains
500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan

500.10.3 Penelitian Kegeologian
500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.3.9 Survei Geologi

500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.4.4 Survei Geologi
500.10.4.5 Konservasi

500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
500.10.5.4 Survei Geologi

500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
500.10.6.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri

500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.7 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)

500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)

500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)

500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)

500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS

500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas

500.10.7.7 Partisipasi Interest

500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan

500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan

500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran

	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi
500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT
500.10.12 Panas Bumi
500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak
500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair
500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
500.10.12.8 Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi
500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13 Bioenergi

500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
500.10.13.2 Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
500.10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
500.10.13.5 Evaluasi/Revisi HIP BBN
500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi
500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
500.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga

500.10.14 Aneka Energi
500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.15 Konservasi Energi
500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
500.10.15.9 Invesment Grade Audit (IGA)
500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE

500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja

500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik

500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik

500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu

500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistikan

500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin

500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik

500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik

500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)

500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan

500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan,

		Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara

500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara

500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral

500.10.26.1 Ketenagakerjaan

500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral

500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral

500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral

500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)

500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral

500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)

500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)

500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral

500.10.26.12 Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)

500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral

500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir

500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral

500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral

500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral

500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara

500.10.27.1 Ketenagakerjaan

500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara

500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara

500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara

500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara

500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara
500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara
500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

500.10.28 Penerimaan Negara
500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi
500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan

500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi
500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan
500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
500.10.29.17 Pengawasan Teknis
500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi
500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi
500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi

500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral

500.10.31 Sarana Litbang
500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan
500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi

500.10.32 Afiliasi
500.10.32.1 Proyek Percontohan
500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
500.10.32.4 Penyajian Informasi

500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
500.10.33.1 Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan

500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi
500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi
500.10.34.3 Laboratorium
500.10.34.4 Study
500.10.34.5 Teknologi Proses
500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk
500.10.34.7 Teknologi Gas

500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara

500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
500.10.36.1 Energi baru terbarukan
500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN
500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

500.11.7 Perlengkapan Jalan
500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

500.11.8 Angkutan Penumpang
500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
500.11.8.7 Angkutan perintis
500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum

500.11.9 Angkutan Barang
500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
500.11.9.2 Tarif angkutan barang
500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan

500.11.10 Monitoring Operasional
500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda

500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.11.11.1 Pedoman Teknis
500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.11.3 Bimtek PPNS

500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan

500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)

500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan

500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan

500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.18.1 Manajemen lalu lintas

500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau

500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
- 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
- 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.21 Tarif dan Keperintisan
- 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan

500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
- 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
- 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
- 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
- 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
- 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah

500.11.24 Angkutan Perkotaan
- 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
- 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
- 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
- 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
- 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan

500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan

500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan

500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan

500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota

500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan

500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan

500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian

500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.28 Pengembangan Keselamatan

500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan

500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan

500.11.29.1 Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum

500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum

500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau

500.11.31 Audit Keselamatan

500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia

500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.32 Inspeksi Keselamatan

500.11.32.1 Pedoman keselamatan
500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.33 Parkir
500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta
500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.12.2 Telekomunikasi
500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3 Penyiaran
500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal
500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur
500.12.5 Pengendalian Informatika
500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban
500.12.6 e- Government
500.12.6.1 Tata Kelola e-Government
500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government
500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan
500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik
500.12.7 e- Business
500.12.7.1 Tata Kelola e-Business
500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business

500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Busniness
500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
500.12.9.4 Industri Konten Multimedia
500.12.10 Keamanan Informasi
500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi
500.12.11 Komunikasi Publik
500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik
500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
500.12.12.2 Informasi Perekonomian
500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13 Pengelolaan Media Publik
500.12.13.1 Media Cetak
500.12.13.2 Media Online
500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14 Kemitraan Komunikasi
500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15 Infrastruktur Informatika
500.12.15.1 Jaringan
500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
500.12.15.3 Keamanan Informatika
500.12.16 Sistem dan Data
500.12.16.1 Portal dan Konten
500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
500.12.17 Pusat Kerjasama
500.12.17.1 Kerja Sama daerah
500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
500.12.18.1 Pelayanan Informasi
500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
500.12.18.3 Bimbingan Teknis

500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
  - 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
  - 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
  - 500.13.2.3 Industri Pariwisata
  - 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
  - 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
- 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
  - 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
  - 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
  - 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
  - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
- 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
  - 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
  - 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
  - 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
- 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK
  - 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
  - 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
  - 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi
- 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
  - 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
  - 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
  - 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK
- 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
  - 500.14.2.1 Perencanaan
  - 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah,

Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba

500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan

500.14.2.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi

500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus

500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus

500.14.3 Survei

500.14.3.1 Perencanaan

500.14.3.2 Persiapan

500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas

500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi

500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan

500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei

500.14.4 KonsolidasiI Data Statistik

500.14.4.1 Kompilasi Data

500.14.4.2 Analisis data

500.14.4.3 Penyusunan Publikasi

500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja

500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6 Bina Pemagangan
500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
500.15.8.3 Bursa Kerja
500.15.8.4 Analisis Jabatan
500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
500.15.9.1 Antar Kerja
500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal

500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11 Standardisasi Profesi
500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
500.15.12.2 Perjanjian Kerja
500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.14.1 Pengupahan
500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja

500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan
500.15.20 Bina Penegakan Hukum
500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL
500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan

500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4 Promosi Penanaman Modal
500.16.4.1 Pengembangan Promosi
500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
500.16.4.4 Promosi Sektoral
500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
500.16.5.2 Kerja Sama Regional
500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN
500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
500.17.4 Sengketa Tanah
500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI
500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
500.18.2.4 Advokasi Pertanahan

500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
- 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
- 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
- 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
- 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman

500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
- 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
- 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
- 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
- 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi

500.18.5 Partisipasi Masyarakat
- 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
- 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
- 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
- 500.18.5.4 Pelayanan Investasi

500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
- 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
- 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
- 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
- 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
- 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
- 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
- 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
- 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi

500.18.8 Pengembangan Usaha
- 500.18.8.1 Kewirausahaan
- 500.18.8.2 Produksi
- 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan

500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
- 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
- 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
- 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
- 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana

500.18.10 Penyerasian Lingkungan
- 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
- 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
- 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air

600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai

600.1.2.2 Kelembagaan

600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air

600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air

600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan

600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

600.1.3.2 Manajemen Mutu

600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air

600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman

600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air

600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai

600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa

600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai

600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)

600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo

600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan

600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan

600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan

600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan

600.1.8 Pembangunan Jalan

600.1.8.1 Standar dan Pedoman

600.1.8.2 Manajemen Konstruksi

600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage

600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng

600.1.9 Preservasi Jalan
- 600.1.9.1 Standar dan Pedoman
- 600.1.9.2 Perencanaan Teknis
- 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
- 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan

600.1.10 Pengelolaan Jembatan
- 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
- 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
- 600.1.10.3 Teknik Jembatan
- 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus

600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
- 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
- 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
- 600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan

600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
- 600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol
- 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
- 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
- 600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol

600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
- 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
- 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan

600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
- 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
- 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
- 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
- 600.1.14.5 Kelembagaan

600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
- 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
- 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
- 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
- 600.1.15.5 Kelembagaan

600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
- 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
- 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
- 600.1.16.5 Kelembagaan
- 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
- 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
- 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
- 600.1.17.5 Kelembagaan
- 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
- 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
- 600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
- 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
- 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
- 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
- 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
- 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
- 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
- 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
- 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
- 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.2.5.2 Analisa Teknik
- 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
- 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan

600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
- 600.2.6.1 Perencanaan Teknik
- 600.2.6.2 Penyediaan
- 600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
- 600.2.6.4 Pengelolaan

600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
- 600.2.7.1 Perencanaan Teknik
- 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
- 600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
- 600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
- 600.2.7.5 Perencanaan Teknik
- 600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni

600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
600.2.8.1 Perencanaan Teknik
600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum
600.2.8.3 Fasilitasi Hunian Berimbang
600.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9 Investasi Infrastruktur
600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
600.2.9.4 Pasar Infrastruktur
600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan
600.2.10.2 Kontrak Konstruksi
600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan
600.2.10.4 Manajemen Mutu
600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
600.2.11.1 Kelembagaan
600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi
600.2.12.2 Penerapan Kompetensi
600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas
600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2 Pengembangan Materi
600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.16.1 Antar Sektor
600.2.16.2 Antar Wilayah
600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan

600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2 Perencanaan
600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.4 Pemetaan
600.3.4.1 Peta Dasar
600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP
600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4 Ekonomi Lingkungan
600.4.5 Dampak Lingkungan

600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak
600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak
600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.8.1 Pengembangan
600.4.8.2 Pemanfaatan
600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
600.4.8.4 Keamanan Hayati
600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
600.4.9.2 Rawa
600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
600.4.10.1 Perangkat mitigasi
600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
600.4.14.1 Pemantauan
600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15 Pengelolaan Sampah
600.4.15.1 Pembatasan sampah

600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
600.4.18.1 Penyidikan
600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19 Komunikasi Lingkungan
600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
600.4.23.1 Pengelolaan Data
600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25 Standarisasi dan teknologi
600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN
700.1 PENGAWASAN INTERNAL
700.1.1 Rencana Pengawasan
700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan

700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN
800.1 SUMBER DAYA MANUSIA
800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus

800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800.1.2.5 Pengangkatan ASN
800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN

800.1.3 Mutasi Pegawai
800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja
800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)

800.1.4 Pengembangan Karir
800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
800.1.4.2 Penyesuaian ijazah
800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
800.1.4.5 Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit

800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara
800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja

800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
800.1.6.1 Kode Etik Pegawai
800.1.6.2 Disiplin
800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
800.1.6.5 Pemberhentian Sementara
800.1.6.6 Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN,

		Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas

800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
800.1.12.10 Rekam Medis
800.1.13 Administrasi Perseorangan
800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
800.1.13.4 Sekretaris Daerah
800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14 Penilaian Kompetensi
800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
800.2.2.4 Modul-modul diklat
800.2.2.5 Panduan fasilitator
800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800.2.3 Widyaiswara
800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
800.2.4.5 Sistem informasi diklat
800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat

800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat

800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)

900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)

900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan

900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

900.1.2 Penyusunan Anggaran

900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan

900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota

900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah

900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

900.1.3 Pelaksanaan Anggaran

900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS

900.1.3.2 Pendapatan

900.1.3.3 Belanja

900.1.3.4 Pembiayaan Daerah

900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan

900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

900.1.3.7 Daftar Gaji

900.1.3.8 Kartu Gaji

900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)

900.1.3.10 Laporan Keuangan

900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)

900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)

900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya

900.1.4.4 Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender

900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
900.1.4.10 Staff Appraisal Report
900.1.4.11 Report /Laporan
900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah
900.1.4.13 Completion Report/Annual Report
900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi
900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran

900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
900.1.7.3 Buku Rekening Bank
900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening

900.1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran

900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu

900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12 Anggaran Daerah
900.1.12.1 Anggaran Daerah
900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan

		pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
	900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	

900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. BRISMAN YAHYA